

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai tata cara penyusunan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sawahlunto:

1. Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dimasa pandemi Covid-19 pada badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) kota Sawahlunto untuk tahapan dan alur nya tetap sama dengan tahun sebelumnya, yang berbeda hanya pada saat pelaksanaan kegiatan dimana harus mengikuti peraturan protokol kesehatan seperti kegiatan rapat yang dilaksanakan melalui media zoom meeting.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sawahlunto adalah salah satu lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Tanggung jawab utama badan ini adalah membantu walikota dalam perencanaan pembangunan daerah. Prosedur penyusunan anggaran di Bappeda Kota Sawahlunto diawali dengan Musrenbang untuk menentukan rencana pendanaan alokasi data di daerah, yang nantinya akan disusun dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah daerah membuat RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentang bagaimana memanfaatkan materi dari rencana kerja pemerintah pusat selama satu tahun. Setelah menetapkan rencana kerja pemerintah daerah, pemerintah daerah harus menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Kerja SKPD. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RKA) yang harus disepakati pada akhir Juli. KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan pimpinan Kota Sawahlunto. Tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) Bappeda menyiapkan draft surat edaran

kepala daerah tentang penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan bagi kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepahaman yang berisi KUA dan PPAS. Pendekatan kerangka belanja jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja digunakan untuk menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD akan tersedia paling lambat awal Agustus. Selanjutnya TAPD melakukan pembahasan penyusunan Bapeda berdasarkan RKA-SKPD yang disusun oleh SKPD. TAPD mengadakan diskusi untuk mengkaji kesesuaian RKA SKPD dan KUA, PPAS, good forward forecast telah disetujui pada tahun anggaran sebelumnya. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD kota Sawahlunto dan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum ditetapkan oleh walikota disampaikan kepada Gubernur terlebih dahulu untuk evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk mencapai keselarasan antara kebijakan daerah dan nasional.

3. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah kota dan daerah terkait. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan harus disampaikan kepada walikota dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan dimaksud. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD diselesaikan pada tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
4. Dokumen-dokumen berikut digunakan dalam prosedur penyusunan anggaran di Bappeda Kota Sawahlunto: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (KUA -PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD).

## 5.2 Saran

Baik perusahaan pemerintah maupun swasta menempatkan nilai tinggi pada anggaran mereka. Akibatnya, perusahaan harus membuat pengetahuan anggaran tersedia untuk setiap divisi, khususnya bagian anggaran, untuk memastikan bahwa penyusunan dan pelaksanaan anggaran berjalan lancar.

Proses penyusunan anggaran Bappeda Kota Sawahlunto sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam penyusunan anggaran tersebut. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang diperlukan Bappeda untuk mengatasi masalah keterlambatan penyusunan anggaran, khususnya harus ada pemisahan persiapan antara penyusunan KUA dan PPAS agar pengesahan tidak memakan waktu terlalu lama. Kedua, bagian-bagian yang terlibat dalam prosedur penyusunan anggaran harus meningkatkan koordinasinya, dan ketiga, diharapkan setiap bagian meningkatkan disiplinnya. Alhasil, tidak menghambat penyusunan anggaran.
2. Dalam hal prosedur penyusunan anggaran, dokumen terkait anggaran harus diarsipkan dengan baik sehingga tidak ada dokumen yang hilang dan mudah ditemukan.

